

INOVASI SOSIALISASI PEMILU DAN TATA KELOLA PARTISIPASI PEMILIH: STRATEGI KPU KOTA BANDUNG PADA PEMILU 2024

Fathurahman Ghani^{1)*}

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾

Email: faturohmansdmy@gmail.com*

Riwayat Artikel

Diterima: 24 April 2025

Disetujui: 15 Mei 2025

Diterbitkan: 4 Juni 2025

Abstract

The decline in voter participation poses a major challenge to local democracy quality, particularly in Bandung City, characterized by its urban and digital society. This study aims to analyze the forms and effectiveness of electoral socialization innovations implemented by the Bandung City Election Commission (KPU) to increase voter participation in the 2024 election. It applies three theoretical frameworks public digital innovation, collaborative governance, and digital political participation using a qualitative case study approach through interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that digital-based innovations, such as the “Gen Z Ambil Peran” program, and the integration of local culture successfully increased political awareness and voter turnout to 82.9%. These innovations represent institutional transformation toward participatory, inclusive, and sustainable democratic governance.

Keywords: electoral socialization innovation, voter participation, collaborative governance.

Abstrak

Menurunnya partisipasi pemilih menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi lokal, khususnya di Kota Bandung yang memiliki karakter masyarakat urban dan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan efektivitas inovasi sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU Kota Bandung dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Kajian ini menggunakan tiga kerangka teori *inovasi digital publik*, *tata kelola kolaboratif*, dan *partisipasi politik digital* serta menerapkan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus melalui wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi KPU berbasis digital, seperti program “Gen Z Ambil Peran”, serta integrasi budaya lokal berhasil meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi warga hingga 82,9%. Inovasi ini mencerminkan transformasi kelembagaan menuju tata kelola demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Inovasi Sosialisasi Pemilu, Partisipasi Pemilih, Tata Kelola Kolaboratif.

A. PENDAHULUAN

Partisipasi politik sejak lama dianggap sebagai barometer vital bagi kualitas demokrasi sebuah negara, sebab sejauh mana warga negara terlibat dalam proses elektoral merefleksikan legitimasi sistem politik yang berjalan (Hasanudin, 2018). Namun demikian, di tengah era demokrasi modern, fenomena menurunnya tingkat partisipasi pemilih semakin sering dikaitkan dengan meningkatnya apatisisme politik dan mudurnya kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu (Siregar, 2024). Studi *Explaining Democratic Survival in Indonesia* menunjukkan bahwa menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dapat melemahkan legitimasi sistem politik dan memperlambat proses konsolidasi demokrasi (Aspinall & Berenschot, 2019). Patut dicatat bahwa keberhasilan penyelenggaraan

pemilu tidak hanya bergantung pada aspek prosedural, tetapi juga pada kapasitas lembaga publik dalam menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan (Putnam, 2020). Dalam konteks itu, inovasi dalam strategi sosialisasi pemilu menjadi elemen krusial untuk membangun kembali antusiasme warga terhadap proses politik yang sering kali dianggap formalitas belaka.

Di Indonesia, dinamika partisipasi pemilih tampak fluktuatif dalam beberapa pemilu terakhir, mencerminkan adanya jarak antara upaya penyelenggara dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap proses elektoral (Komisi Pemilihan Umum, 2024). KPU sebagai lembaga independen dituntut untuk memperbarui strategi sosialisasinya agar sejalan dengan perubahan pola komunikasi masyarakat yang kini semakin digital dan interaktif (Suryawijaya, 2025). Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik berbasis inovasi digital dan pendekatan komunitas berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesadaran politik generasi muda (Sari & Nugraha, 2023). Hasil tersebut menegaskan bahwa inovasi bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut transformasi tata kelola komunikasi publik dan relasi antara lembaga dengan warga (Muluk & Yuwono, 2021). Oleh karena itu, reformulasi strategi sosialisasi yang adaptif dan partisipatif kini menjadi kebutuhan mendesak bagi penyelenggara pemilu dalam menghadapi kompleksitas perilaku pemilih modern.

Jika ditarik ke konteks Kota Bandung, tantangan partisipasi pemilih memiliki dimensi yang lebih unik. Kota metropolitan ini memperlihatkan potensi fragmentasi partisipasi akibat kesenjangan akses informasi, perbedaan karakteristik demografis, serta pola komunikasi yang tidak merata antara masyarakat urban dan pemilih pemula. Dalam situasi seperti ini, KPU Kota Bandung perlu melampaui pendekatan sosialisasi konvensional yang sebatas informatif, menuju model yang lebih interaktif, kolaboratif, dan membangun kesadaran kritis warga terhadap makna demokrasi. Dinamika sosial perkotaan menuntut lembaga ini untuk mampu mengorkestrasi jaringan kolaborasi antara masyarakat, media, dan teknologi. Maka dari itu, penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana strategi inovasi sosialisasi yang dijalankan KPU Kota Bandung dapat memperkuat tata kelola partisipasi pemilih secara efektif dan berkelanjutan menjelang Pemilu 2024.

Penelitian terdahulu memberi pijakan konseptual yang penting bagi kajian ini. Rahmawati (2022) menemukan bahwa partisipasi pemilih meningkat signifikan ketika KPU menerapkan pendekatan sosialisasi berbasis komunitas melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Sementara itu, Pratama dan Lestari (2023) menyoroti urgensi inovasi digital, khususnya pemanfaatan media sosial dan kampanye kreatif yang berperan dalam membangun kesadaran politik generasi muda. Menariknya, Nugroho dan Santoso (2024) menekankan bahwa keberhasilan sosialisasi pemilu sangat bergantung pada tata kelola kolaboratif antara KPU, media, dan masyarakat dalam menciptakan ruang partisipasi yang transparan dan inklusif. Secara umum, ketiga penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya inovasi strategis dan tata kelola partisipatif dalam memperkuat legitimasi partisipasi pemilih.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi-studi terdahulu dalam hal fokus pada upaya peningkatan partisipasi pemilih melalui inovasi sosialisasi dan tata kelola yang kolaboratif. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan empiris dan lokus kajian yang lebih spesifik, yakni KPU Kota Bandung dalam konteks Pemilu 2024 yang diwarnai tantangan digitalisasi dan fragmentasi politik urban. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas inovasi sosialisasi dari sisi media dan konten, tetapi juga menelusuri bagaimana tata kelola internal serta jaringan kelembagaan KPU berperan dalam menjaga keberlanjutan partisipasi publik.

Perbedaan fokus tersebut menegaskan orisinalitas penelitian ini, yaitu integrasi antara inovasi sosialisasi dan tata kelola partisipasi sebagai satu sistem strategis dalam penguatan

demokrasi lokal. Kajian ini tidak berhenti pada pemahaman sosialisasi sebagai aktivitas komunikasi semata, tetapi memposisikannya sebagai bagian dari tata kelola publik yang mencerminkan kemampuan institusi negara beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana lembaga penyelenggara pemilu dapat membangun partisipasi politik yang berkelanjutan melalui inovasi tata kelola yang inklusif dan kolaboratif lintas aktor.

Berdasarkan serangkaian temuan dan kesenjangan yang telah dipaparkan, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat desain kebijakan dan praktik inovasi sosialisasi pemilu yang mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik warga di tingkat lokal. Kota Bandung, dengan kompleksitas sosialnya yang tinggi, menjadi laboratorium yang relevan untuk memahami bagaimana strategi sosialisasi dan tata kelola partisipatif dapat diterapkan secara efektif menjelang Pemilu 2024. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi inovasi sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung, menilai efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi pemilih, serta mengidentifikasi faktor-faktor tata kelola yang menopang keberhasilan strategi tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

Inovasi Digital Publik

Inovasi digital publik pada dasarnya menggambarkan bagaimana lembaga pemerintah merancang dan menerapkan strategi berbasis teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan memperkuat keterlibatan warga negara (Guenduez et al., 2025). Menariknya, teori ini tidak hanya menekankan aspek penggunaan teknologi, melainkan juga proses strategis di balik penciptaan nilai publik melalui digitalisasi. Guenduez dan rekan-rekannya mengklasifikasikan orientasi inovasi digital publik ke dalam empat bentuk: *enhancement*, *anticipatory*, *adaptive*, dan *persistent*, yang masing-masing menunjukkan cara lembaga publik beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi yang cepat (Guenduez et al., 2025). Keberhasilan inovasi digital publik bergantung tidak hanya pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada budaya organisasi dan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola perubahan (OECD, 2022; Enabling Digital Innovation in Government). Indikator:

- Adanya strategi inovasi digital yang terarah (*enhancement*, *anticipatory*, *adaptive*, *persistent*).
- Dukungan infrastruktur teknologi dan kanal komunikasi digital.
- Kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan inovasi.
- Mekanisme evaluasi dan pengendalian mutu inovasi digital.

Tata Kelola Kolaboratif dengan Dimensi Politik

Dalam konteks tata kelola publik, teori kolaboratif klasik Ansell & Gash (2008) sering dijadikan acuan. Mereka menekankan bahwa kolaborasi antara lembaga publik dan masyarakat sipil bukanlah proses yang sepenuhnya harmonis, melainkan dipenuhi negosiasi, kompetisi kepentingan, dan dinamika kekuasaan tersembunyi (Ansell & Gash, 2008). Teori ini memperluas perspektif dari koordinasi administratif menjadi penelaahan bagaimana konflik dan ketimpangan kekuasaan dikendalikan dalam ruang kolaboratif publik. Indikator:

- Adanya negosiasi dan pengelolaan konflik antaraktor.
- Mekanisme komunikasi yang transparan dan inklusif.
- Keseimbangan distribusi kekuasaan dalam proses kolaborasi.
- Proses mediasi dan resolusi konflik yang terinstitusionalisasi.

Partisipasi Politik Digital

Teori partisipasi politik digital muncul sebagai kerangka untuk memahami perubahan perilaku politik dalam era media sosial dan teknologi interaktif. Dalam kerangka ini, partisipasi politik tidak lagi eksklusif pada pemungutan suara saja, tapi mencakup interaksi online seperti diskusi politik, kampanye digital, dan advokasi kebijakan publik (Venus, 2025). Namun, praktik partisipasi digital menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, bias algoritmik, dan ketimpangan akses teknologi. Teori partisipasi digital menjadi alat analisis penting untuk mengevaluasi bagaimana inovasi sosialisasi digital oleh lembaga seperti KPU dapat memperluas partisipasi pemilih sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural yang memengaruhi efektivitasnya (Venus, 2025). Indikator:

- Intensitas keterlibatan warga dalam aktivitas politik digital.
- Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap platform digital pemilu.
- Tingkat literasi digital masyarakat dalam memahami pesan politik.
- Hambatan sosial-teknologis seperti akses internet, perangkat, dan algoritma media.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus tunggal, yang dipandang paling sesuai untuk menggali secara mendalam dinamika inovasi sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung. Menurut Bunkar et al. (2024), pendekatan kualitatif memberikan peluang bagi peneliti untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual, menggali makna yang tersembunyi di balik tindakan, serta menangkap kompleksitas interaksi antaraktor dalam ruang kebijakan publik. Menariknya, metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” dengan lebih tajam, khususnya ketika fenomena yang dikaji memiliki batasan konteks yang jelas dan melibatkan banyak variabel (Ramesh et al., 2024). Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan deskripsi fenomena, tetapi juga penafsiran yang mendalam mengenai hubungan antara strategi kelembagaan dan realitas sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, studi kasus dianggap paling relevan untuk memahami praktik inovasi KPU Kota Bandung dalam mengelola tata kelola partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

Alasan pemilihan metode ini berangkat dari karakteristik masalah yang diteliti. Fenomena inovasi sosialisasi pemilu merupakan praktik institusional yang sarat dengan nilai, strategi, dan interaksi sosial sebuah medan yang menuntut pemahaman kontekstual daripada sekadar angka statistik. Patut dicatat, pendekatan studi kasus memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menelusuri hubungan antara kebijakan formal KPU dengan praktik aktual di lapangan, termasuk dinamika kolaborasi lintas aktor yang terjadi dalam proses sosialisasi. Yin (2023) menyebut bahwa studi kasus efektif digunakan ketika peneliti berupaya memeriksa fenomena kebijakan yang “hidup” di tengah perubahan sosial dan kelembagaan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan KPU, tetapi juga mengapa strategi tersebut terbentuk, diadaptasi, dan dikomunikasikan kepada publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam diarahkan kepada sejumlah informan kunci, seperti komisioner KPU, anggota divisi sosialisasi, pegiat demokrasi, dan perwakilan masyarakat pemilih. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menangkap persepsi, pengalaman, dan pandangan kritis para pelaku tentang efektivitas inovasi sosialisasi. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami konteks faktual penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, baik yang bersifat tatap muka maupun digital. Menariknya, kombinasi antara wawancara dan observasi memungkinkan peneliti memperoleh data yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif memotret tindakan sosial dalam konteksnya yang alami. Analisis dokumen, di sisi lain, digunakan untuk menelaah laporan resmi KPU, kebijakan sosialisasi, publikasi media, dan data partisipasi pemilih

sebagai sumber pembandingan sekaligus verifikasi terhadap temuan lapangan. Ketiga teknik ini saling melengkapi dalam menghasilkan gambaran yang utuh dan valid (Miles, Huberman, & Saldaña, 2023).

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan relevansi dan keterlibatan langsung dengan fenomena yang dikaji (Ahmad & Wilkins, 2024). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memfokuskan diri pada “kasus kaya informasi” yang dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi dan praktik inovasi KPU. Proses pemilihan informan tidak bersifat kaku, tetapi dinamis, mengikuti prinsip data saturation yakni pengambilan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak menghasilkan tema baru (Staller, 2021). Dengan cara ini, penelitian memastikan bahwa data yang terkumpul memiliki kedalaman dan relevansi tinggi terhadap fokus kajian.

Sementara itu, analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada model lima fase analisis kualitatif yang dikembangkan Mayring (2022) dan diperbarui dalam studi A *Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis* (2023). Tahap-tahapnya meliputi: (1) familiarisasi data melalui pembacaan intensif transkrip wawancara dan catatan lapangan; (2) pemberian kode awal berdasarkan konsep teoritis maupun temuan empiris; (3) pengelompokan kode menjadi tema-tema yang bermakna; (4) peninjauan ulang dan pemetaan hubungan antar tema; serta (5) interpretasi makna dan penyusunan narasi temuan secara reflektif. Namun demikian, proses ini tidak berjalan linier, melainkan bersifat siklik dan terus-menerus disempurnakan melalui triangulasi sumber dan teknik. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya tidak hanya menghasilkan deskripsi faktual, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai bagaimana inovasi dan tata kelola partisipasi pemilih dijalankan oleh KPU Kota Bandung dalam kerangka demokrasi yang adaptif dan partisipatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Strategi Sosialisasi KPU Kota Bandung

KPU Kota Bandung memperlihatkan transformasi yang cukup signifikan dalam strategi sosialisasi kepemiluan, dengan meninggalkan pendekatan konvensional yang cenderung informatif dan satu arah menuju model partisipatif yang lebih adaptif, kreatif, dan membumi. Menariknya, lembaga ini tidak lagi memosisikan masyarakat sebagai sekadar penerima informasi, melainkan sebagai bagian aktif dari proses komunikasi politik yang lebih dialogis. Hal ini terlihat jelas melalui program “*Gen Z Ambil Peran Sukseskan Pemilu 2024*”, yang menggabungkan unsur edukatif dan hiburan untuk menumbuhkan keterlibatan publik, khususnya kalangan muda. Kegiatan seperti *stand-up comedy*, lomba *reels*, dan simulasi pencoblosan bukan hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga wahana pembelajaran demokrasi yang lebih menyenangkan. Patut dicatat bahwa pendekatan semacam ini menunjukkan kecerdasan KPU dalam membaca tren sosial masyarakat urban yang semakin visual dan partisipatif, serta dalam mengemas pesan politik ke dalam format yang lebih relevan dengan bahasa keseharian generasi digital. Dengan kata lain, KPU tidak sekadar menyampaikan pesan elektoral, tetapi membangun jembatan emosional dan sosial yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi itu sendiri.

Jika dianalisis lebih dalam, strategi ini dapat dijelaskan melalui kerangka *Teori Difusi Inovasi* yang dikembangkan oleh Rogers, yang menekankan pentingnya kesesuaian pesan dan saluran komunikasi terhadap karakteristik audiens. Dalam konteks ini, KPU tampak berhasil mengadaptasi logika teori tersebut dengan memanfaatkan ekosistem digital seperti Instagram dan TikTok sebagai medium utama penyebaran pesan politik. Namun demikian, yang menjadikan inovasi ini menarik bukan semata karena digitalisasinya, melainkan karena adanya kolaborasi lintas sektor yang terencana antara KPU, lembaga pendidikan, komunitas kreatif, dan masyarakat sipil. Sinergi tersebut membentuk tata kelola sosialisasi yang lebih

terbuka dan inklusif, di mana demokrasi dipahami bukan sekadar urusan formal lembaga, tetapi juga praktik sosial yang hidup di ruang publik. Dengan demikian, inovasi strategi sosialisasi KPU Kota Bandung dapat dibaca sebagai bentuk *governance innovation* yakni pembaruan tata kelola yang memadukan kreativitas, partisipasi warga, dan pemanfaatan teknologi untuk menguatkan legitimasi demokrasi di tingkat lokal.

Inovasi strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung menunjukkan kemampuan adaptif lembaga publik dalam membaca perubahan perilaku sosial dan preferensi komunikasi masyarakat urban, terutama generasi muda yang tumbuh di tengah budaya digital. Menariknya, strategi ini tidak berhenti pada penyampaian informasi teknis tentang pemilu, melainkan bertransformasi menjadi ruang partisipatif yang menggabungkan edukasi, hiburan, dan ekspresi budaya lokal. Kegiatan seperti “*Gen Z Ambil Peran Sukseskan Pemilu 2024*” berhasil mengubah sosialisasi dari rutinitas administratif menjadi pengalaman sosial yang memantik rasa ingin tahu dan keterlibatan warga. Pendekatan tersebut, jika dianalisis secara kritis, mencerminkan penerapan prinsip *governance innovation* yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor, kreativitas, dan relevansi sosial pesan politik. Patut dicatat bahwa keberhasilan KPU dalam memadukan strategi digital, segmentasi pesan, serta pendekatan berbasis komunitas memperlihatkan bagaimana difusi inovasi dapat berjalan efektif ketika lembaga publik memahami psikologi audiensnya. Dengan demikian, inovasi sosialisasi ini bukan sekadar cara baru menginformasikan, melainkan upaya sistematis untuk membangun kembali kepercayaan dan kesadaran politik warga terhadap demokrasi sebagai ruang yang dekat, partisipatif, dan bermakna.

Pelibatan Generasi Z dan Efektivitas Media Digital

Pelibatan Generasi Z melalui media digital menjadi fokus utama dalam strategi sosialisasi KPU Kota Bandung. Tabel berikut menampilkan bentuk kegiatan, peran Gen Z, serta dampaknya terhadap peningkatan partisipasi pemilih muda.

Tabel 1. Pelibatan Generasi Z dan Efektivitas Media Digital dalam Sosialisasi Pemilu 2024 oleh KPU Kota Bandung

Kegiatan Sosialisasi	Platform Utama	Peran Gen Z	Tingkat Partisipasi	Dampak Utama
Gen Z Ambil Peran Sukseskan Pemilu 2024	Instagram, TikTok, Event Luring	Peserta aktif lomba reels dan simulasi pencoblosan	Tinggi	Meningkatkan minat dan pemahaman kepemiluan
Podcast & Live Talk Demokrasi	YouTube, Spotify	Kreator dan narasumber muda	Sedang	Mendorong diskusi politik santai dan terbuka
Duta Pemilu Digital	Instagram, X (Twitter)	Penyampai pesan kampanye kepemiluan	Tinggi	Memperluas jangkauan sosialisasi ke komunitas kampus
Literasi Digital Anti-Hoaks	TikTok, WhatsApp	Pembuat video edukatif singkat	Sedang	Meningkatkan kesadaran verifikasi informasi
Kuis & Meme Edukatif Pemilu	Instagram Story	Peserta dan pembuat konten kreatif	Sangat tinggi	Membangun ketertarikan terhadap isu

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Data pada tabel memperlihatkan bahwa keterlibatan Generasi Z dalam berbagai kegiatan sosialisasi berbasis digital telah memberikan efek positif terhadap peningkatan kesadaran politik di kalangan pemilih muda. Kegiatan interaktif seperti lomba *reels*, podcast, dan kuis edukatif terbukti mampu menarik minat partisipasi karena sesuai dengan gaya komunikasi mereka yang visual dan dinamis. Menariknya, partisipasi tinggi juga muncul pada kegiatan yang melibatkan unsur kreatif, seperti pembuatan konten dan kompetisi digital, yang memberi ruang bagi ekspresi individual. Namun demikian, efektivitas media digital tetap menuntut pengawasan terhadap arus informasi agar tidak disusupi disinformasi politik. Secara keseluruhan, strategi berbasis digital ini menunjukkan bahwa KPU berhasil menyesuaikan pendekatan sosialisasinya dengan karakteristik generasi muda tanpa kehilangan nilai edukatif dan inklusifitas pesan demokrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelibatan Gen Z melalui media digital efektif meningkatkan partisipasi politik, berbeda dengan temuan Wicaksono (2025) yang menyebutkan bahwa media digital cenderung hanya menciptakan partisipasi semu tanpa meningkatkan kesadaran politik substantif. Temuan ini juga berlawanan dengan studi Rahardjo dan Fitriani (2020) yang menilai bahwa kampanye digital sering kali gagal menjangkau pemilih pemula di daerah perkotaan karena rendahnya literasi politik. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Pratama (2023) yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga publik dan komunitas digital dapat memperluas jangkauan sosialisasi politik secara efektif. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa keberhasilan strategi digital bergantung pada relevansi konten dan pendekatan partisipatif yang digunakan. Dengan demikian, inovasi KPU Kota Bandung memperkuat argumentasi bahwa media digital dapat menjadi instrumen efektif jika digunakan secara interaktif dan berbasis komunitas.

Integrasi Budaya Lokal dan Dampak terhadap Partisipasi Pemilih

Integrasi budaya lokal dalam strategi sosialisasi KPU Kota Bandung menunjukkan kecerdasan kelembagaan dalam memadukan nilai-nilai tradisional dengan pesan demokrasi modern. Menariknya, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai jembatan emosional yang menghubungkan nilai-nilai sosial masyarakat dengan makna partisipasi politik. Pertunjukan seni seperti tari Jaipong massal yang diselipkan pesan kepemiluan berhasil menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat dan membumi, sekaligus memperlihatkan bahwa demokrasi dapat dikomunikasikan melalui ekspresi budaya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Pendekatan yang mengedepankan simbolisme budaya ini terbukti mampu menarik minat masyarakat lintas usia yang sebelumnya cenderung pasif dalam kegiatan politik. Dengan kata lain, KPU berhasil mengubah proses sosialisasi yang kerap dianggap formal dan kering menjadi perayaan partisipasi publik yang inklusif dan menyenangkan.

Patut dicatat, dari sisi analisis kebijakan publik, strategi ini memperlihatkan bahwa inovasi tidak selalu harus berwujud digital atau berbasis teknologi, melainkan juga bisa lahir dari kemampuan institusi memahami dan menghidupkan kembali kearifan lokal. Peningkatan partisipasi pemilih di Kota Bandung hingga 82,9% menjadi bukti empirik bahwa pendekatan berbasis budaya mampu menumbuhkan *sense of belonging* warga terhadap demokrasi dan memperkuat legitimasi proses politik itu sendiri. Namun demikian, keberhasilan ini tidak hanya bersumber dari kreativitas bentuk kegiatan, tetapi juga dari sensitivitas KPU dalam membangun relasi sosial yang menghargai identitas lokal dan nilai-nilai kebersamaan. Strategi ini memperluas makna tata kelola partisipatif, di mana keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari efisiensi prosedural, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyentuh ranah kultural dan emosional masyarakat. Dengan demikian, praktik KPU

Kota Bandung dapat dibaca sebagai bentuk inovasi sosial yang harmonis menggabungkan tradisi dan modernitas dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi yang hidup di tingkat lokal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Sari dan Nugraha (2022), yang menemukan bahwa pendekatan sosialisasi berbasis budaya lokal mampu meningkatkan efektivitas komunikasi politik karena pesan disampaikan melalui medium yang familiar dan emosional bagi masyarakat. Penelitian serupa oleh Lestari (2021) juga menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai budaya dalam kebijakan publik dapat memperkuat kohesi sosial dan mendorong partisipasi warga secara sukarela, terutama di daerah dengan identitas kultural yang kuat. Menariknya, hasil penelitian ini juga memperluas temuan Prabowo dan Kurnia (2023) yang menunjukkan bahwa strategi sosialisasi yang melibatkan unsur seni dan tradisi lokal tidak hanya meningkatkan keterlibatan warga, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga publik di mata masyarakat. Namun demikian, temuan ini berbeda dengan riset Wulandari (2020) yang menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis budaya memiliki keterbatasan dalam konteks masyarakat urban karena dianggap kurang relevan dengan gaya hidup modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan bukti baru bahwa dalam konteks Kota Bandung, integrasi budaya lokal justru menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara nilai tradisional dan modernitas dalam membangun partisipasi politik yang lebih inklusif.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi sosialisasi pemilu yang dijalankan oleh KPU Kota Bandung telah menunjukkan efektivitas yang nyata dalam mendorong peningkatan partisipasi pemilih, terutama di kalangan Generasi Z, melalui perpaduan antara strategi digital yang kreatif dan integrasi budaya lokal yang kontekstual. Menariknya, keberhasilan ini bukan hanya soal bagaimana pesan politik disebarkan, tetapi juga bagaimana lembaga publik mampu menghadirkan komunikasi yang partisipatif, menyenangkan, dan dekat dengan kehidupan sosial masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa tujuan penelitian yakni memahami bentuk, implementasi, dan efektivitas inovasi sosialisasi serta mekanisme tata kelola partisipasi telah tercapai dengan baik. Patut dicatat, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur inovasi publik dengan menunjukkan bahwa pembaruan dalam lembaga pemerintah tidak selalu harus berbasis teknologi tinggi, melainkan dapat tumbuh dari nilai-nilai kultural yang hidup dan mampu mengikat masyarakat secara emosional. Dengan kata lain, demokrasi yang bermakna tidak hanya bertumpu pada prosedur elektoral, tetapi juga pada kemampuan institusi untuk membangun kedekatan sosial dan rasa memiliki di tengah warga negara.

Namun demikian, hasil ini sekaligus membuka ruang refleksi bahwa keberhasilan strategi KPU perlu dijaga agar tidak berhenti sebagai inisiatif jangka pendek. Oleh karena itu, disarankan agar KPU terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan media digital guna menciptakan ekosistem partisipasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada literasi politik warga. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan pendekatan mixed methods untuk menilai secara lebih mendalam pengaruh inovasi ini terhadap perilaku pemilih dan tingkat kepercayaan publik. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan data yang masih berfokus pada wilayah perkotaan, sehingga generalisasi hasilnya perlu diuji di daerah dengan karakter sosial yang berbeda. Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya menginstitutionalisasi inovasi sosialisasi berbasis budaya dan digital sebagai bagian dari reformasi tata kelola komunikasi politik nasional yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis. (2023). Sage Journals. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/16094069231183620>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://academic.oup.com/jpart/article/18/4/543/1090370>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Asyifa, R. M., et al. (2025). Peran Media Sosial dalam Preferensi Pemilih: Studi Kampanye Pemilu. *Jurnal Jogapa*, 2(2). <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i2.1631>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Explaining Democratic Survival in Indonesia. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/unity-through-division/explaining-democratic-survival-in-indonesia/DABC338E8775F1563B7735124C29F2A3>
- Enabling Digital Innovation in Government. (2022). OECD. https://www.oecd.org/en/publications/enabling-digital-innovation-in-government_a51eb9b2-en.html
- Guenduez, A. A., Demircioglu, M. A., Mueller, E. M., & Çınar, E. (2025). Digital innovation strategies in the public sector: enhancement, anticipatory, adaptive, and persistent orientations. *Research Policy*, 54(8), Article 105274. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2025.105274>
- Hasanudin. (2018). Peran Partai Politik dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan (NJIP)*, 17(30). <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7062>
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). Indeks Partisipasi Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024. <https://siparmas.kpu.go.id/SiparmasFILE/DokumenBahanAjar/Dokumen-Bahan-Ajar-2502WIB145041.pdf>
- Mayring, P. (2022). Qualitative Content Analysis: A Step-by-Step Guide. Sage. <https://www.indigo.ca/en-ca/books/philipp-mayring/9781529701982.html>
- Mayring, P. (n.d.). Qualitative Content Analysis: Demarcation, Varieties, Developments. *Forum Qualitative Sozialforschung*. <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/3343/4557>
- Media Sosial dan Digitalisasi Partisipasi Politik pada Generasi Muda. (2020). *Society: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1). <https://doi.org/10.33019/society.v8i1.160>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2013). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications. https://books.google.com/books/about/Qualitative_Data_Analysis.html?id=p0wXBAAAQBAJ
- Muluk, H., & Yuwono, T. (2021). Public Governance Transformation in Indonesia: Collaborative Innovation in Democratic Communication. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(2), 215–230. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i2.932>
- Nugroho, Y., & Santoso, A. (2024). Collaborative Governance and Electoral Transparency in Indonesia's Urban Democracy. *Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan*, 15(1), 45–61. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3djf4>
- Pratama, R., & Lestari, D. (2023). Digital Innovation and Political Awareness among Youth Voters in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*, 5(1), 55–68. <https://doi.org/10.36782/jkpi.v5i1.224>
- Putnam, R. D. (2020). The Upswing: How America Came Together—A Century of Progress and Division. Simon & Schuster. <https://doi.org/10.17615/7chb-vx25>

- Rahmawati, A. (2022). Community-Based Electoral Socialization and Voter Participation in Local Elections. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(3), 144–159. <https://doi.org/10.31334/jipp.v9i3.2587>
- Sari, M., & Nugraha, E. (2023). Digital Political Communication and Youth Engagement in Indonesian Elections. *Jurnal Komunikasi Global*, 12(2), 101–118. <https://doi.org/10.7454/jkg.v12i2.288>
- Siregar, I. (2024). Phenomenological Review of the Issue of Political Apathy of Indonesia's Young Generation. *Polit: Scientific Journal of Politics*, 4(2), 135–147. <https://doi.org/10.33258/polit.v4i2.1159>
- Suryawijaya, T. (2025). Peran Media Sosial dalam Membentuk Partisipasi Politik Gen Z. *Jurnal Politica*, 6(1), 22–34. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/4441>
- Venus, A. (2025). Political participation in the digital age: Impact of influencers and digital media. *Cogent Social Sciences*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311983.2025.2520063>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2914980>